



# RENCANA KERJA (RENJA)



DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN 2017

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara 2017. Rencana kerja ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010-2025 yang di sesuaikan dengan urusan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Rencana Kerja ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Rencana Program dan kegiatan serta anggaran Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata. Dalam Rencana Kerja juga juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil/kinerja.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam urusan menjalankan kewenangan Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam melakukan tugas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki visi ke depan sesuai dengan visi organisasi yang telah disepakati yaitu : “ **MEWUJUDKAN PELAYANAN TERBAIK TERHADAP PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAN BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL** ”. Sejumlah tujuan strategik, sasaran strategik, program dan kegiatan telah didefinisikan dan akan diimplementasikan selama periode 2016– 2021 demi pencapaian visi tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut dalam memenuhi dokumen perencanaan kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara, maka disusunlah Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018 yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan kebutuhan program, kegiatan dan anggaran tahun 2017 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara tahun 2018.

Masamba, 2017

**KEPALA DINAS,**

**Drs. F.P. PATUANG, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19610929 1983 1 008

# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

### BAB I Pendahuluan

- A. Latar belakang
- B. Landasan hukum.
- C. Maksud dan tujuan
- D. Sistematika penulisan

### BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Disbudpar Tahun 2017

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disbudpar Tahun 2017 dan Capaian Renstra Disbudpar
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disbudpar
- D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### BAB III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Disbudpar

### BAB IV Penutup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan, termasuk juga Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara, untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, transparan, dan legitimit, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung efektif dan efisien serta bebas dari korupsi dan kolusi serta nepotisme, Setiap unit pemerintahan yang ada dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara, termasuk juga Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Luwu Utara, harus berpartisipasi dalam mewujudkan terselenggaranya Good Governence tersebut yang diawali dengan disusunnya Rencana Strategi untuk masa lima tahun dan Rencana Kerja untuk setiap tahun.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam setiap tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis, baik dalam skala nasional, regional, propinsi, maupun lokal. Penyusunan Renja SKPD tetap memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada serta memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagai acuan dalam mengelola organisasi.

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara merupakan penyelenggara pemerintahan yang mencakup kegiatan administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan administrasi pelayanan publik. Kondisi umum administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan administrasi pelayanan publik pada saat ini sebagian satuan unit kerja Disbudpar belum sesuai harapan yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia atau personel yang ditempatkan untuk membantu dalam sub perencanaan.

Dokumen Renja SKPD ini merupakan penjabaran selain dari dokumen regulasi Kebudayaan dan kepariwisataan juga dari dokumen Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara. Dokumen ini dikaji dengan menggunakan pendekatan optimalisasi Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Luwu Utara.

Tahun 2017 merupakan awal periode bagi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan rancangan RPJMD dan rancangan Renstra SKPD tahun 2016-2021. Berdasarkan hal tersebut maka program dan kegiatan yang akan direncanakan pada rancangan Renja Disbudpar Tahun 2018 adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target dan sasaran bidang kebudayaan dan pariwisata dalam pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

Dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten Luwu Utara diperlukan optimalisasi pengembangan Kebudayaan dan Kepariwisata terutama dalam menciptakan masyarakat yang kokoh, sehat dan berdaya saing tinggi, perlunya suatu system manajemen Kebudayaan dan Kepariwisata pada suatu daerah yang strategis, cepat tanggap dan mampu menghadapi setiap perubahan dan berbagai kebutuhan masyarakat sehingga norma-norma sosial yang berlandaskan adat istiadat lokal masih tetap terpelihara dengan baik.

Untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara berkomitmen bahwa Rencana Strategis merupakan hal yang sangat urgen dan vital untuk memberikan arah/pedoman untuk implementasi seluruh program dan kegiatan karena seperti wacana yang lahir pada General Assembly yang diadakan di Santiago pada tahun 1999, saat penetapan Global Code Of Ethics For Tourism (Kode etik Pariwisata) Dunia yang disahkan oleh PBB ( Persatuan Bangsa-Bangsa) melalui resolusi 2001/37, pariwisata dinyatakan sebagai industry terbesar di abad 21. Hal ini diakui pula 137 negara anggota WTO ( World Tourism Organization) karena menyadari bahwa sektor pariwisata telah memberikan sumbangan yang berarti terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto.

Untuk Indonesia, sumbangan dari pariwisata memiliki peranan yang tidak disebut kecil, dalam kontribusi untuk devisa Negara, bahkan sebelum masa krisis, kontribusi sektor pariwisata terhadap perolehan devisa mencapai 10 % dari keseluruhan devisa Negara.

Menyadari hal demikian untuk meningkatkan dan optimalisasi potensi produk wisata yang ada, serta mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perkembangan untuk meningkatkan dan mengembangkan kepariwisataan melalui penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018. Agar terarahnya pengembangan kebudayaan & Pariwisata yang lebih baik dan terpadu.

Peningkatan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata dengan penggalan potensi budaya dan wisata serta peningkatan kualitas produk wisata Kabupaten Luwu Utara tentu dalam hal ini memerlukan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 memiliki sinergi antar sektor-sektor terkait secara utuh serta terpadu dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang menjadi pertimbangan untuk pengembangan pariwisata adalah memperhatikan factor ekonomis, teknis, sosial, budaya, hemat energy, dan ada pelestarian alam dan lingkungan.

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk perusahaan objek yang mengikat dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut. Kebudayaan merupakan totalitas daripada perwujudan, Aktualisasi, ekspresi, ide atau gagasan yang berkembang dan hidup di dalam masyarakat baik bergerak maupun tidak bergerak termasuk didalamnya antara lain karya pentas, kerajinan, peninggalan sejarah dan purbakala serta kehidupan sosial masyarakat.

## **B. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Disbudpar Tahun 2018 ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan lembaran Negara Nomor 4966)
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara tahun 2010 Nomor 103, Tambahan lembaran Nomor 5168)

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Daerah Nomor 21 tahun 2011.
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata no:PM.34/HM.001/MKP/2008 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 106/HK.501/MKP/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang SPM Bidang Kesenian.
14. Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017.

15. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 211);
22. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipasi
23. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45)

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. MAKSUD**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan SKPD, bertujuan untuk memberikan pedoman dalam mengarahkan sekaligus menjadi acuan, bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mencapai visi dan misi RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018. Pencapaian tersebut, ditempuh melalui rangkaian upaya terpadu dan terarah, sesuai dengan strategi, arah kebijakan, program dan indikator kegiatan yang ditetapkan yang bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu sama lainnya di dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Luwu Utara. Berdasarkan pertimbangan ini maka Renja disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017
- b. Menyediakan acuan bagi seluruh Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 dalam menyusun program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun;
- c. Mewujudkan seluruh jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 dalam mencapai tujuan dengan melaksanakan program dan kegiatan;
- d. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 memahami dan menilai program dan kegiatan operasional tahunan dalam tentang waktu satu tahun;

### **2. TUJUAN**

Adapun tujuan penyusunan RENJA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 adalah:

- a. Meningkatkan pembangunan, pengembangan, penataan, dan pembenahan objek serta daya tarik wisata serta prasarana pendukungnya.
- b. Meningkatkan kualitas layanan wisata.
- c. Menumbuhkan kesadaran, kepedulian dan peran serta masyarakat secara aktif dalam kegiatan kepariwisataan.

- d. Meningkatkan promosi pariwisata, budaya dan potensi alam secara konsisten, baik secara lingkup nasional, regional, internasional.
- e. Mengembangkan sikap kritis terhadap budaya asing untuk mengadopsi budaya yang masuk.
- f. Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam seni dan budaya untuk mencapai sasaran pemberi inspirasi bagi kepekaan rasa untuk mengacu pada etika, moral estetika dan agama serta nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Luwu Utara.

#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Renja Disbudpar Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

##### **BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Disporabudpar Tahun 2015**

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Disbudpar Tahun 2015 dan Capaian Renstra Disbudpar
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disbudpar
- D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan**

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Disbudpar

##### **BAB IV Penutup**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISBUDPAR TAHUN 2016

#### A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2016 DAN CAPAIAN RENSTRA DISBUDPAR

##### Hasil Pengendalian Dan Evaluasi Renja Disbudpar

##### Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016

SKPD	Capaian Kinerja Out Come dan Out Put		Kriteria Capaian Kinerja		Jumlah Dan Persentase Capaian Kegiatan						Kriteria Ketepatan Perencanaan
	2016 (%)	2017 (%)	2016	2017	Prog	Keg	rendah	Sesuai Target	Melebihi Target	Tdk Terlaksana	% Yang Memenuhi Target
Disbudpar	12,73	49,26	Sangat rendah	Sangat tinggi	11	62	8	5	18	46	Sedang
	97,00	70,01	Sangat tinggi	Sedang							

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Disbudpar dari *Tabel 1* Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tergambar bahwa SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara khusus target realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2016 masing-masing pada capaian kinerja *out come* (program) sebesar **100%** dengan kriteria tingkat capaian kinerja kategori **Tinggi** dan *out put* (kegiatan) sebesar **100%** dengan kriteria tingkat capaian kinerja kategori **Tinggi**. Sementara untuk tingkat capaian target program kegiatan Renstra SKPD sampai dengan tahun 2016, capaian kinerja *out come* sebesar **186,11%** dengan kriteria tingkat capaian kinerja kategori **Sangat Tinggi** dan *out put* sebesar **185,00%** dengan kriteria tingkat capaian kinerja kategori **Sangat Tinggi**, dari capaian tersebut terdapat beberapa kegiatan yang terlaksana sesuai target dari kegiatan yang ada atau capaian 100% dan telah mencapai target diatas 80%, sementara terdapat juga kegiatan yang pencapaiannya rendah dibawah 80%, dan juga terdapat kegiatan yang tidak terlaksana.

Dari tabel di atas di ketahui bahwa terdapat 9 kegiatan yang tidak terlaksana karena mengingat kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan baru sebagai penunjang kegiatan di tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2016 telah melakukan efisiensi terhadap program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara.

Tahun 2016 merupakan awal dari terbentuknya dinas kebudayaan dan pariwisata, dimana anggaran kegiatan sebelumnya yang dikelola oleh Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara adalah sebesar Rp.7.677.433.000,- untuk mendanai pelaksanaan 9 program dan 45 indikator kegiatan yang direncanakan dalam Renja 2016. Dari jumlah dana tersebut realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp 1.993.369.666,-. atau sebesar 26% dari target selama 1 tahun anggaran. Hal ini terjadi karena banyak kegiatan dijadwalkan dilaksanakan pada triwulan III dan IV. Beberapa kegiatan merupakan pembangunan fisik serta pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan renja sampai dengan triwulan ke II ini sudah terlaksana sesuai dengan jadwal yang direncanakan, dan untuk kegiatan yang berupa pembangunan fisik sedang pada tahap perencanaan, yang akan dilanjutkan pelaksanaan pembangunannya pada tribulan III dan IV.

Di dalam Pelaksanaan Renja Dinas kebudayaan dan pariwisata untuk tahun anggaran 2016 ada beberapa program kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan maupun yang tidak mencapai target kenerja, antara lain sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, rata-rata tingkat capaian realisasi keuangan sekitar 100% terhadap rencana kegiatan 2016 sedangkan rata-rata tingkat capaian terhadap rencana kerja Renstra SKPD tahun 2010-2015 mencapai 100% dari target 100%. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :
  - a. Penyediaan jasa surat menyurat dengan hasil persuratan sampai ketujuan dengan presentase kinerja 100% dan realisasi keuangan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan hasil proses komunikasi dan konsultasi berjalan lancar, dengan realisasi keuangan Rp 9.000.000,00.
  - c. Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan hasil kondisi ruang kerja yang bersih dengan presentase kinerja 100%, dengan realisasi keuangan sebanyak Rp 53.400.000,00
  - d. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan hasil tercapai, dengan realisasi kuangan sebanyak Rp 3.000,000.
  - e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan hasil peningkatan kapasitas pegawai dengan presentase 80% akibat anggaran yang minim menyebabkan bahan bacaan yang disediakan terbatas, dengan realisasi keuangan sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan hasil menghadiri rapat koordinasi dan undangan seminar dari instansi terkait yang pelaksanaannya diluar wilayah Kab. Lutra dengan presentasi kinerja 100%, dengan realisasi keuangan sebanyak Rp 167.492.000,00.
  - g. Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian dan Asset dengan hasil penataan administrasi keuangan, kepegawaian dan asset kearah yang lebih baik dengan presentase kinerja 100%, dengan realisasi keuangan sebanyak Rp 552.560.000,00.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, rata-rata tingkat capaian realisasi keuangan sekitar 100% terhadap rencana kegiatan tahun 2016.
- a. Pengadaan mabeleur yang merupakan kegiatan baru untuk dengan realisasi keuangan sebanyak Rp 100.000.000,00
  - b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional demi kelancaran pelaksanaan tugas rutin kantor dapat terlaksana dengan baik, dengan realisasi keuangan sebanyak Rp 15.000.000,00.
  - c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor agar dapat berfungsi dengan baik demi kelancaran tugas-tugas kantor, dengan realisasi keuangan sebanyak Rp 26.000.000,00.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan hasil peningkatan skill dan keterampilan teknis, dengan rata-rata tingkat capaian realisasi keuangan 100% terhadap rencana kegiatan tahun 2016, dengan realisasi keuangan sebanyak Rp 52.500.000,00
  - b. Pendidikan pelatihan struktural bagi PNS daerah tidak dapat berlangsung atau tidak dijalankan
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD rata-rata tingkat capaian keuangan sekitar 100% terhadap rencana kinerja kegiatan tahun 2015 sedangkan rata-rata tingkat capaian terhadap rencana kinerja renstra SKPD tahun 2010-2015 mencapai 100% dari target 100% (terlampir) adapun rincian sebagai berikut :

Penyusunan laporan capaian kinerja dari ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan hasil berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan LPPD dengan presentase 100%, dengan realisasi keuangan sebanyak Rp 4.500.000,00.

5. Program Pelayanan Kedinasan  
Kunjungan kerja bersama Bupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah dalam rangka evaluasi kinerja Disbudpar tahun 2016 dapat berjalan dengan baik, dengan realisasi keuangan sebanyak Rp 20.100.000,00.
6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata  
Pelaksanaan promosi pariwisata dalam rangka mempromosikan kepariwisataan nusantara baik di dalam maupun luar negeri dengan capaian kinerja 100%, dengan realisasi keuangan Rp 75.200.000.
7. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
  - a. Pengembangan nilai dan geografi sejarah, dengan tingkat capaian 100% terhadap rencana kinerja kegiatan 2016, sedangkan rata-rata tingkat capaian terhadap rencana kinerja Renstra SKPD tahun 2010-2016 mencapai 100% dari target 100%, dengan realisasi keuangan sebanyak Rp 188,600.000.

- b. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya dengan realisasi capaian 100% dan realisasi keuangan sebanyak Rp 386,950.000
8. Program Pengembangan Nilai Budaya  
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama dibidang budaya tidak terlaksana.  
Hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan perubahan Renja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata tahun 2016 dan pencapaian Renstra DISBUDPAR 2016-2021 pada tabel 1 terlampir.

## **B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Disbudpar harus dilaksanakan secara terkoordinasi lintas bidang dan lintas sub secara terpadu (integritied), terukur (mesurable) dan dapat dipertanggungjawabkan (accontable) dengan senantiasa memperhatikan hierarki struktural yang berlaku di dalam lingkungan Disbudpar. Tugas pokok dan fungsi yang dikemukakan diatas dapat digambarkan diatas melalui pelayanan yang dilaksanakan oleh dinas Disbudpar sesuai dengan Tabel 2 (Terlampir )

Analisa Kinerja Pelayanan Disbudpar diukur menggunakan indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD tahun 2016- 2021. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2016 diharapkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Disbudpar tersebut dapat dicapai, sehingga dapat menggambarkan tingkat kinerja pelayanan Disbudpar tahun 2016 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Disbudpar. Untuk mengukur kinerja pelayanan Disbudpar, maka di tahun 2016 ini, telah ditetapkan target kinerja yang telah disepakati bersama.

Seperti yang telah kita ketahui dari tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Disbudpar Tahun 2016 diatas terdiri dari 2 (dua) sasaran atau bidang dengan 10 (sepuluh) indikator pencapaian sasaran, dari table diatas dijelaskan bahwa ada beberapa indikator yang sudah mencapai target dan ada juga indikator yang belum mencapai target seperti :

### **1) Bidang Kebudayaan**

Sasaran Berkembangnya kebudayaan dan kesenian tradisional disetiap kecamatan. Sasaran ini didukung melalui pelaksanaan program-program yaitu

Program Pengembangan Nilai Budaya, dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya. Dari tabel ter sebut dapat di gambarkan sehingga kami dapat menyimpulkan gambaran pada tabel diatas. Dari enam (6) indikator kinerja sebagai berikut

- a. Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk (Pembinaan dan pembentukan sanggar seni/ Tari/ Budaya. Dari 5 buah pembuatan dan pembentukan sanggar seni/tari/ budaya hanya 3 buah terealisasi pada tahun 2016. Sanggar seni kuda lumping, pengadaan alat musik elekton dan pakaian tari bali. hal ini di sebabkan anggaran APBD tahun 2016 sangat minim untuk pembinaan dan pembentukan sanggar seni tari budaya di setiap kecamatan.
- b. Pelestarian upacara adat dan budaya daerah.  
Program Pelestarian upacara adat dan budaya daerah tidak dilakukan program kegiatannya karena kegiatan tersebut diserahkan kepada Pemangkut adat tersebut dengan suadaya masyarakat setempat sehingga tidak di anggarkan di APBD tahun 2016.
- c. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya.  
Dari 5 kali penyelenggaraan festival seni dan budaya yang di targetkan hanya 2 kali teralisasi pada tahun 2016 yaitu pagelaran seni dan pagelaran tari – tarian daerah.
- d. Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.  
Dari 1 buah gedung per 10.000 penduduk setiap kecamatan dari 1 target yang di harapkan tidak teralisasi pada tahun 2016, hal ini disebabkan anggaran APBD tahun 2016 tidak di anggarkan mengakibatkan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan
- e. Jumlah sarana dan penyelenggaraan seni dan budaya
- f. Dari target sarana dan penyelenggaraan seni dan budaya yang ditargetkan 75% hanya dapat terealisasi 50% tahun anggaran 2016.
- g. Jumlah benda/situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.  
Dari jumlah presentasi benda/situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan ditargetkan 75% dan dapat terealisasi 75% tahun anggaran 2016.  
Pelestarian nilai budaya daerah dan nilai sejarah kearifan local sangat memprihatikan di sebabkan karena kurang nya alokasi anggaran pada sector kebudayaan untuk pemeliharaan bangunan sejarah penyebaran agama islam di

Sulawesi Selatan di daerah Makam Datok Pattimang Malangke. Selain itu termasuk pembinaan sanggar seni di beberapa tempat dan juga pengadaan peralatan tenun batik rongkong dan seko.

## **2) Bidang Pariwisata**

Sasaran Meningkatnya promosi wisata daerah dalam rangka menarik minat wisatawan domestik maupun lokal. Dari tabel tersebut dapat di gambarkan bahwa terbentuknya dinas kebudayaan dan pariwisata kab Luwu Utara yaitu sejak tahun 2012 sehingga kami dapat menyimpulkan gambaran pada tabel 2 pada tabel pencapaian kinerja pelayanan Disbudpar. Dari lima (5) indikator kinerja sebagai berikut

a. Jumlah kunjungan wisatawan lokal.

Dari 24.649 pada tahun 2016 orang di targetkan kunjungan wisatawan lokal hanya terealisasi 51.000 orang pada tahun 2016. Sasaran berkembangnya jasa pariwisata dengan indikator jumlah wisatawan dengan target jumlah wisatawan yang berkunjung ke ODTW sebanyak 25.000 yang terealisasi hanya sebanyak 51.000 wisatawan

b. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.

Dari 100 orang di targetkan kunjungan wisata nusantara hanya terealisasi 850 orang pada tahun 2016. Hal ini disebabkan karena sudah terpublikasinya ODTW yang ada di Kabupaten Luwu Utara.

c. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

Dari 3 orang yang ditargetkan pada Renstra tahun 2016-2021 dimana pada tahun 2016 di target dan 3 orang kunjungan wisata mancanegara namun terealisasi 27 orang pada tahun 2014 dan 17 orang pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena adanya promosi profil wisata yang dikirim ke daerah – daerah sehingga wisatawan mancanegara yang sudah ada di indonesia dapat melihat profil wisata (DVD, Brosur dan pameran Pembangunan yang diikuti oleh instansi terkait) tersebut sehingga dapat meluangkan waktu untuk mengunjungi daerah ODTW yang ada di Kab. Luwu utara.

d. Jumlah potensi ODTW baru yang terbuka

Dari 5 potensi ODTW baru yang terbuka yang ditargetkan tidak dapat terealisasi. Hal ini disebabkan karena masih perlu pembenahan ODTW yang

sudah ada sehingga pada tahun 2015 pembuatan Set Plain tahun 2015 fokus kepada ODTW air panas pincara untuk tahun 2016 sampai 2021 hanya satu yang di fokuskan pengembangannya dari 5 (Lima) ODTW.

- e. Dari 0,11% target kontribusi sektor pariwisata (hiburan dan rekreasi) terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto ) tidak dapat terealisasi. Hal ini disebabkan karena kurangnya anggaran untuk melakukan kegiatan tersebut.

Hasil Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara terlampir pada tabel 2 sebagai berikut :

### **C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DISBUDPAR**

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian (Strategic Issue) yaitu peraturan perundang-undangan, kebijakan operasional dan Ketersediaan Anggaran. Dalam hal peraturan perundang-undangan, diperlukan sosialisasi yang interen dalam hal aturan yang bersifat pembinaan dan pengembangan perlindungan masyarakat adat serta pengembangan nilai-nilai budaya dan kepariwisataan.

Dalam kategori kebijakan, diperlukan kebijakan untuk mengalokasikan dana yang cukup untuk pengembangan pelayanan kebudayaan dan pariwisata. Dalam kebijakan operasional, segala macam kebijakan yang berkaitan langsung dengan pengembangan pelayanan kebudayaan dan pariwisata tidak boleh saling bertentangan guna membangun kepercayaan masyarakat umum Kabupaten Luwu Utara.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Disbudpar Kabupaten Luwu Utara, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Disbudpar Kabupaten Luwu Utara.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Disbudpar, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Disbudpar sebagai berikut :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Disbudpar Kabupaten Luwu Utara:
  - a. Masih Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Di Bidang Pariwisata

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas yang diharapkan mempunyai daya saing tinggi ternyata masih jauh dari memadai. Terutama SDM di bidang pariwisata yang memiliki pemikiran strategik dan visioner. Kondisi tersebut dapat menghambat kualitas dari segala aktivitas kegiatan pariwisata Kabupaten Luwu Utara. Hal tersebut memberikan implikasi pada kualitas pariwisata Kabupaten Luwu Utara itu sendiri, yang dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat dengan daerah-daerah lain.

b. Masih Rendahnya Daya Saing Unit Bisnis Kepariwisata

Secara umum daya saing unit bisnis pariwisata Kabupaten Luwu Utara masih kurang. Kelemahan tersebut menyangkut masalah manajemen produk, kurangnya sajian atraksi pariwisata dan budaya, sumber daya manusia, dan pemasaran

c. Masih Rendahnya Aksesibilitas Menuju Ke Obyek Wisata

Meskipun secara umum kondisi jalan maupun panjang jalan di Kabupaten relatif baik, akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa kualitas maupun kuantitas jalan menuju obyek wisata masih relatif rendah.

d. Kemampuan daya tarik destinasi unggulan harus mendapatkan perhatian serius bagi semua aparat dan pelaku kepariwisataan.

2. Adapun permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

a. Program dan kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian indikator cakupan kajian seni masih sangat minim;

b. Keterlibatan pihak ketiga seperti pengusaha, insan media massa, penyandang dana, dsb masih minim;

c. Sumber Daya Manusia sangat terbatas. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas yang diharapkan mempunyai daya saing tinggi ternyata masih jauh dari memadai. Terutama SDM di bidang pariwisata yang memiliki pemikiran strategik dan visioner. Kondisi tersebut dapat menghambat kualitas dari segala aktivitas kegiatan pariwisata Kabupaten Luwu Utara. Hal tersebut memberikan implikasi pada kualitas pariwisata Kabupaten Luwu Utara itu sendiri, yang dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat dengan daerah-daerah lain.

- d. Belum tersedianya fasilitas untuk gelar seni dan memasarkan karya seni yang memadai.
  - e. Bergesernya nilai budaya wija to Luwu akibat dari dampak arus globalisasi dan keterbukaan informasi.
  - f. Masih Terbatasnya Obyek Wisata Yang Sudah Tertata. Kesiapan obyek wisata sebagai produk pariwisata tentunya merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Disamping besarnya potensi obyek wisata yang ada di Kabupaten Luwu Utara, ternyata masih banyak potensi obyek wisata yang belum tertata. Dan yang sudah tertatapun masih belum maksimal dalam penyajiannya.
  - g. Infrastruktur ODTW unggulan masih minim
  - h. Banyak potensi ODTW namun memerlukan biaya tinggi
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Disbudpar Kabupaten Luwu Utara

a. **Peluang :**

- 1) Potensi seni, budaya, objek wisata dan daya tarik wisata di Kabupaten Luwu Utara cukup besar;
- 2) Banyaknya lembaga/pihak di dalam dan luar negeri yang tertarik akan kekayaan budaya baik berupa benda peninggalan sejarah dan purbakala (benda cagar budaya) maupun tak benda seperti kesenian dan nilai tradisi.
- 3) Kondisi sosial masyarakat cukup mendukung;
- 4) Kondisi keamanan di Kabupaten Luwu Utara cukup menunjang;
- 5) Tren perjalanan wisata yang meningkat setiap tahunnya;
- 6) Perkembangan teknologi informasi untuk keperluan promosi yang memungkinkan calon wisatawan memperoleh akses informasi terkini mengenai keanekaragaman destinasi.
- 7) Kekayaan alam dan budaya yang melimpah mapu menjadikan keragaman dan keunikan daya tarik alam dan budaya sebagai magnet untuk mendatangkan wisatawan
- 8) Pemerintahan yang semakin stabil lebih mampu melaksanakan pembangunan terutama infrastruktur.
- 9) Perkembangan implementasi tata pemerintahan yang baik (good govermance) memberikan ruang bagi perbaikan sistem manajemen

pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata baik antar sektor, antar instansi, antar wilayah dan antar tingkatan pemerintah.

**b. Tantangan**

- 1) Perkembangan pariwisata di daerah lain yang cukup berkembang pesat;
  - 2) Ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan yang kurang memadai;
  - 3) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan;
  - 4) Pengaruh budaya asing dalam era globalisasi akan berdampak kepada kemungkinan terjadinya erosi ciri khas dan identitas nilai budaya daerah.
  - 5) Apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk daerah masih rendah antara lain karena keterbatasan informasi.
  - 6) Masih adanya kesenjangan kualitas SDM dan pelaku usaha pariwisata;
  - 7) Pembangunan destinasi yang kurang memperhatikan daya dukung lingkungan akan di tinggalkan pasar.
  - 8) Penanganan sampah dan kebersihan lingkungan yang kurang memadai;
4. Formulasi isu-isu penting berupa Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program prioritas tahun yang direncanakan.

Dari isu-isu strategis tersebut diatas dalam rangka mempercepat pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan visi-misi Bupati Kabupaten Luwu Utara sehingga dalam menyusun Rencana kerja Disbudpar Tahun 2016 untuk senantiasa memperhatikan dengan merekomendasikan untuk ditindaklanjuti dalam bentuk program/kegiatan sebagai salah satu program/kegiatan prioritas Disbudpar sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi terhadap pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan kebijakan alokasi anggaran pengembangan kebudayaan dan pariwisata

2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti gedung kesenian dan sanggar budaya serta museum.
3. Melakukan pembinaan terhadap organisasi sanggar seni
4. Melakukan pelestarian adat dan budaya daerah serta pengembangan nilai dan geografis sejarah
5. Melakukan pengembangan dan revitalisasi di sejumlah ODTW baik yang sudah terbuka maupun yang belum dibuka
6. Memberikan bantuan usaha pemuda produktif dan kreatif serta usaha yang bernilai wisata (kearifan lokal).

#### **D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD yang tertuang dalam Renja Disbudpar Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017, harus mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016–2021 yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016–2021. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada table 3 ( terlampir )

#### **E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Rencana Kerja Dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 pada dasarnya merupakan pengakomodasian program kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan baik untuk pembayaran rutinitas dinas maupun pembiayaan kegiatan yang sudah terencana secara internal juga pengakomodasian program kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, asosiasi-asosiasi yang merupakan stake holder bidang kebudayaan dan kepariwisataan sebagai mitra kerja dinas dalam mengujudkan visi dan misi Bupati Tahun 2016-2021 Menjadikan Kabupaten Luwu Utara jadi daerah Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pariwisata dan Rumah Sehat.

Beberapa usulan program kegiatan masyarakat diperoleh pada saat musrembang yang di ikuti oleh semua unsur terkait, sebagaimana telah dibahas dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 4 (Terlampir).

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010-2015, bahwa Visi Kabupaten Luwu Utara adalah *"Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal"*

Pernyataan misi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021, Misi Kabupaten Luwu Utara yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat Luwu Utara yang Religius, dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya
2. Mewujudkan Peningkatan Derajat Kesehatan
3. Mewujudkan Pembangunan Pendidikan Berkualitas, Kepemudaan, Budaya dan Masyarakat Adat
4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi, Pembangunan Infrastruktur dan Iklim Investasi
5. Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pariwisata dan Rumah Sehat
6. Mewujudkan Penurunan Tingkat Ketimpangan Pendapatan, Regional dan
7. Penciptaan Tingkat Keamanan yang Kondusif

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ditinjau dari sisi tugas pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata, secara umum tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke tiga yaitu Mewujudkan Pembangunan Pendidikan Berkualitas, Kepemudaan, Budaya dan Masyarakat Adat

Dalam Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (*civil liberty*) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (*governance*) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (*climate change*), ketegangan lintas-batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang diberi tugas dalam pembangunan pariwisata dan kebudayaan, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut. Peran Kementerian PPN/Bappenas sangat signifikan dikarenakan budaya merupakan salah satu pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara sedangkan sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang relatif tahan terhadap krisis global serta merupakan salah satu sektor yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pemasukan negara selain migas. Untuk itu, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dituntut memiliki kemampuan untuk dapat menstimulus pembangunan pariwisata dan budaya sehingga dapat mencapai target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”.

Dalam Rencana Kerja Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010–2014 disebutkan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan pariwisata dan budaya adalah Meningkatkan kesadaran, apresiasi, kreativitas dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya, (b) Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, (c) Mengembangkan kepariwisataan yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap terhadap perekonomian nasional dan masyarakat, (d) Meningkatkan kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan dan pariwisata, dan (e) Mewujudkan pengelolaan tugas dan fungsi Kementerian kebudayaan dan kepariwisataan yang bersih dan berwibawa.

Telahaan terhadap Kebijakan Nasional Sebagaimana Misi yang diemban Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata yaitu :

- a. Melestarikan nilai keragaman dan kekayaan budaya dalam rangka memperkuat jati diri dan karakter bangsa.
- b. Mengembangkan jadi industry pariwisata berdaya saing, destinasi yang berkelanjutan dan menerapkan pemasran yang bertanggungjawab (responsible marketing).

- c. Mengembangkan sumberdaya kebudayaan dan pariwisata;
- d. Menciptakan tata pemerintahan yang responsive, transparan dan akuntable.

Dari keempat misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Luwu utara adalah Misi ke tiga yaitu berkaitan dengan mendorong dan meningkatkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan kepariwisataan. Sektor kebudayaan dan pariwisata sangat erat kaitannya dengan alam, warisan budaya, lingkungan sosial, seni, kearifan lokal, toleransi dan tenggang rasa, yang terpadu dengan kemajuan teknologi masa kini. Sektor kebudayaan dan pariwisata tidak saja menjadi sektor pencipta kesejahteraan tetapi juga menciptakan hidup yang berkualitas. Mempertimbangkan karakteristik kebudayaan dan pariwisata tersebut, serta potensi ekonominya yang besar, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menetapkan visi dan misi Tahun 2016–2021 adalah *"Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal"*.

Dalam mewujudkan Visi pembangunan kepariwisataan meliputi :

- a. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berbasis agama dan budaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara selektif, fokus, sinergis, efektif dan efisien berdasarkan keunggulan kompetitif dan kooperatif produk wisata;
- c. Mengembangkan industri pariwisata yang profesional dan berdaya saing mampu menggerakkan kemitraan usaha yang berwawasan lingkungan dan ;
- d. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dengan pola kemitraan, kualitas manajemen, regulasi yang efektif dan efisien dalam mewujudkan kepariwisataan yang berkelanjutan

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tersebut di atas, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010 – 2014 menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- 1. Peningkatan kesadaran dan pemahaman jati diri dan karakter bangsa. dilaksanakan melalui 11 (sebelas) strategi yaitu :

- a. Peningkatan internalisasi nilai-nilai budaya yang mendukung pembangunan karakter dan pekerti bangsa.
  - b. Peningkatan revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai tradisi.
  - c. Peningkatan pemberdayaan komunitas adat.
  - d. Peningkatan internalisasi kesejarahan dan wawasan kebangsaan.
2. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keragaman serta kreativitas nilai budaya seni dan film, maka strategi diarahkan dengan :
    - a. Peningkatan sarana pengembangan, pendalaman dan pagelaran, seni budaya di kota besar dan ibukota kabupaten.
    - b. Peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya.
    - c. Peningkatan apresiasi terhadap karya seni budaya dan perfilman.
    - d. Peningkatan kreativitas dan produktivitas para pelaku seni budaya dan perfilman.
    - e. Peningkatan kualitas pengelolaan galeri nasional
    - f. Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan Lembaga Sensor Film
    - g. Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil kajian sejarah tradisional.
3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan, Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Warisan Budaya, maka strategi diarahkan dengan :
    - a. Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya.
    - b. Peningkatan kualitas pengelolaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan benda cagar budaya, situs, kawasan cagar budaya, dan Kesejarahan.
    - c. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan museum, termasuk naskah- naskah kuno.
4. Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan, maka strategi diarahkan dengan :
    - a. Pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan penelitian di bidang kebudayaan.
    - b. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia kebudayaan.
    - c. Peningkatan kualitas informasi dan basis data kebudayaan.

- d. Pengembangan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, sektor terkait, masyarakat dan swasta.
5. Pengembangan Industri Pariwisata yang Berdaya Saing, maka strategi diarahkan dengan:
  - a. Penguatan industri pariwisata dan keterkaitan antara industri pariwisata dan industri kreatif, termasuk dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - b. Peningkatan dan penguatan basis data dan informasi investasi pariwisata.
  - c. Pengembangan *Travel Pattern* serta kemudahan pariwisata.
  - d. Pengembangan UMKM dan industri kreatif bidang pariwisata.
  - e. Penerapan standar kompetensi dan standar usaha pariwisata.
  - f. Penerapan sertifikasi kompetensi pariwisata dan usaha pariwisata dan kode etik pariwisata di destinasi pariwisata.
  - g. Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor.
6. Pengembangan Destinasi Pariwisata yang Berkelanjutan (*sustainability*), maka strategi diarahkan dengan :
  - a. Peningkatan konsolidasi akses transportasi manca negara dan dalam negeri, terutama ke 10 (sepuluh) tujuan pariwisata Indonesia.
  - b. Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata serta meningkatkan kualitas dan standar pelayanan minimum pariwisata;
  - c. Penataan dan diversifikasi daya tarik wisata alam bahari, wisata budaya dan wisata buatan termasuk event dan olah raga.
  - d. Pengembangan kawasan strategis pariwisata berbasis wisata bahari, alam, dan budaya di luar Jawa dan Bali;
  - e. Pengembangan destinasi pariwisata di pulau-pulau terdepan, terluar, dan wilayah perbatasan
  - f. Pengembangan daya tarik wisata dan inovasi produk yang berbasis lingkungan.
  - g. Peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas *stakeholders* pengembangan daya tarik wisata.
  - h. Penataan kebijakan dan manajemen daya tarik wisata dan produk pariwisata

- i. Pemanfaatan media cetak, elektronik dan *public figure* dan media kesenian tradisional.
  - j. Pengamanan dan kenyamanan oleh masyarakat di destinasi.
  - k. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di perdesaan melalui peningkatan PNPM mandiri bidang pariwisata.
  - l. Peningkatan efektifitas pengelolaan destinasi pariwisata melalui peningkatan koordinasi dan keterpaduan pembangunan pariwisata dan *Destination Management Organization* (DMO).
  - m. Peningkatan dan penguatan basis data dan informasi destinasi dan PNPM Mandiri pariwisata.
7. Pengembangan pemasaran pariwisata diarahkan untuk meningkatkan penerimaan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Upaya untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan melalui peningkatan promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri, peningkatan informasi pasar wisata, peningkatan publikasi kepariwisataan, pengembangan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition/MICE*) dengan tetap memberikan dukungan manajemen kepada segenap pelaku pemasaran pariwisata nasional dan daerah.
- Dalam melaksanakan kebijakan umum tersebut di atas, maka arah kebijakan dan strategi pengembangan pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab (*responsible marketing*) di tahun 2010 – 2014 adalah:
- a. Meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara maupun nusantara sebesar 20 (dua puluh) persen secara bertahap dalam 5 (lima) tahun.
  - b. Meningkatkan promosi 10 (sepuluh) tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif.
  - c. Meningkatkan jumlah anggota jaringan situs *online* kepariwisataan Indonesia melalui pengembangan data dan informasi destinasi pariwisata yang dilengkapi dengan dokumentasi dan visualisasi.
  - d. Meningkatkan pemanfaatan informasi pasar pariwisata oleh pelaku pariwisata melalui pelaksanaan *familiarization trip* pada para *Tour Operator, Travel Agencies, Travel Writer* dan *Media Crew* dari negara-negara sumber wisatawan ke berbagai destinasi di Indonesia.

- e. Meningkatkan kuantitas pengguna bahan promosi kepariwisataan melalui penyediaan, penyajian dan diseminasi bahan promosi cetak, elektronik, dan publikasi kepariwisataan.
  - f. Meningkatkan ketersediaan rekomendasi strategi pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata melalui pengembangan analisis pasar dan *market intelligence* kepariwisataan mancanegara dan nusantara baik di tingkat pusat maupun daerah.
  - g. Meningkatkan eksistensi kepariwisataan Indonesia di luar negeri melalui keikutsertaan dan partisipasi segenap pelaku kepariwisataan Indonesia pada bursa kepariwisataan internasional, *sales mission*, *direct selling* dan *roadshow* khususnya di negara-negara fokus pasar.
  - h. Meningkatkan pemahaman masyarakat internasional mengenai kepariwisataan Indonesia melalui dukungan atas penyelenggaraan festival seni, budaya dan pariwisata di mancanegara, serta pelayanan informasi oleh *Visit Indonesia Tourism Officers* di negara-negara fokus pasar.
  - i. Meningkatkan jumlah pergerakan wisatawan nusantara melalui penyelenggaraan *direct promotion*, penyelenggaraan *event* pariwisata utama, serta dukungan bagi penyelenggaraan *event* seni, budaya dan pariwisata di berbagai daerah.
  - j. Meningkatkan pelaksanaan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition/MICE*) nasional dan internasional melalui pengembangan kapasitas, promosi dan *bidding* kegiatan MICE, serta penyelenggaraan dan dukungan *event* MICE.
  - k. Meningkatnya dukungan bagi partisipasi seluruh *stakeholders* dalam promosi pariwisata Indonesia melalui dukungan manajemen SDM, perencanaan, regulasi, evaluasi dan keuangan.
8. Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata yang Tangguh, maka strategi diarahkan dengan :
- a. Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan *hospitality management* yang kompetitif di kawasan Asia

- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kepariwisataan dengan mengembangkan SDM pariwisata berbasis kompetensi melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan di dalam dan di luar negeri.
- c. Peningkatan penelitian dan pengembangan pariwisata dalam mendukung kebijakan pembangunan pariwisata
- d. Peningkatan profesionalisme dan daya saing SDM bidang Pariwisata
- e. Peningkatan dukungan manajemen sumberdaya pariwisata
- f. Pemantapan koordinasi dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat atau pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan di tingkat lokal, nasional dan internasional.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DISBUDPAR**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai.

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) tahun ke depan Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Luwu menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan, pengembangan, penataan dan pembenahan objek serta daya tarik wisata serta prasarana pendukungnya;
2. Meningkatkan kualitas layanan wisata;

3. Menumbuhkan kesadaran, kepedulian dan peran serta masyarakat secara aktif dalam kegiatan kepariwisataan;
4. Meningkatkan promosi pariwisata budaya dan potensi alam secara konsisten, baik dalam lingkup nasional maupun internasional;
5. Mengembangkan sikap kritis terhadap budaya asing untuk mengadopsi budaya yang masuk;
6. Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam seni budaya untuk mencapai sasaran pemberi inspirasi bagi kepekaan rasa untuk mengacu pada etika, moral estetika dan agama serta nilai-nilai budaya Kabupaten Luwu Utara

### **C. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Program/kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Program Lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan.

Perumusan program dan kegiatan untuk tahun 2017, menyesuaikan antara indentifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Disbudpar Kab. Luwu Utara menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Dengan memperhatikan rumusan visi dan misi Disbudpar seperti tersebut di atas dan juga isu-isu strategis serta untuk mencapai target SPM seni budaya, maka dibuatlah program dan kegiatan pembangunan pada bidang kebudayaan dan pariwisata untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun rumusan program dan kegiatan pada Disbudpar pada tahun anggaran 2017 beserta penetapan indikatornya dapat dilihat pada rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang disajikan dalam tabel 5 pada halaman berikut :

a. Program Pengembangan Nilai Budaya

Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- 1) Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah;
- 2) Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya;
- 4) Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya;

b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program ini dimaksudkan untuk mengelola dan melestarikan kekayaan budaya yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- 1) Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya;
- 2) Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno;
- 3) Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah;
- 4) Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah;
- 5) Pengembangan nilai dan geografi sejarah;
- 6) Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka;
- 7) Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala;
- 8) Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya;
- 9) Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah;
- 10) Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala;
- 11) Kajian sejarah seni budaya;

c. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas produk pariwisata Kabupaten Luwu Utara. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- 1) Pengembangan obyek pariwisata unggulan;
- 2) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata;
- 3) Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan;

- 4) Pelaksanaan koordinasi pembangunan obyek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha;
- 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata;
- 6) Pengembangan daerah tujuan wisata;
- 7) Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi;

d. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan pemasaran dan informasi kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Luwu Utara.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- 1) Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek wisata;
- 2) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata;
- 3) Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata;
- 4) Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata;
- 5) Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri;
- 6) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata;

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016-2021 dilingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2017 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2017. Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara masih mengacu kepada Rancangan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan kebudayaan dan Pariwisata yang diemban oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara sebagai salah satu SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara.

Semoga Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Luwu Utara tahun 2017 dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018. Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen.

**Tabel 1**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2017**  
**KABUPATEN LUWU UTARA**

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT)	Target Capaian Kinerja RenStra SKPD Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Kegiatan Tahun 2015	Target Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan 2017		Catatan	JUMLAH		KETERANGAN			
						Target Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi Tahun 2016 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2017	Target Capaian Realisasi Target Renstra (%)		PROGRA M	KEGIATAN	JLH KEGIATAN TERLAKSANA BERDASARKAN TARGET			JLH KEGIATAN TDK TERLAKSANA
															RENDAH	SESUAI/TERCAPAI	MELAMPAUI	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+)	11 = (10/4)	12			< 26	26,40-40	> 40		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran	85	%			52,52			96,79		1						
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat-Surat Dinas Terkirim/masuk	75.000	Surat	0	15.000	15.000	100,00	15.000	30.000	40,00		1	1	1			
	2 Peyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Rekening Listrik dan Jaringan Internet	2	Jenis	0	2	2	100,00	1	3	150,00		1			1		

3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas yang terpelihara	2	Unit	0	2	2	100,00	2	4	200,00			1				1	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah cleaning servis dan alat/bahan pembersih kantor yang dsediakan	5	Org	0	2	2	100,00	1	3	60,00			1				1	
5	Peyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen alat-alat Listrik	35	Jenis	0	20	20	100,00	20	40	114,29			1				1	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20	Jenis	0	7	7	100,00	7	14	70,00			1				1	
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Aparat yang mengikuti rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	50	PNS	0	25	24	96,00	26	50	100,00			1				1	
8	Penatausahaan Keuangan, Administrasi, Kepegawaian, Ketatausahaan dan Aset	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan dan Kepegawaian	20	Dokumen	0	4	4	100,00	4	8	40,00			1			1		

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	85	%					31		-	184		1					
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	5	Unit	0	-	-	-	1	1	20,00			1	1				
2	Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	8	Paket	0	1	1	100,00	4	5	62,50			1				1	
3	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1	Paket	0	1	1	100,00	1	2	200,00			1				1	
4	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	5	Unit	0	1	1	100,00	2	3	60,00			1				1	
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	30	Jenis	0	10	10	100,00	3	13	43,33			1				1	
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor	Jumlah peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	5	Jenis	0	1	1	100,00	35	36	720,00			1				1	

3	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Persentase Efisiensi dan efektifitas, kapasitas sumber daya aparatur</b>	85	%				9				23	1					
	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang - undangan	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Bimtek	35	Orang	0	2	3	150,00	5	8	22,86		1	1				
4	<b>Program Peningkatan Pengembangan sistem Palaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Persentase tertibnya administrasi dan laporan tepat waktu sesuai SAP</b>	85	%				25				58	1					
	1	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen Lakip, Renstra, Renja yang dilaporkan	12	Dokumen	0	3	3	100,00	4	7	58,33		1				1	
5	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan</b>		<b>Persentase Pelayanan Kedinasan</b>	85	%				10				18	1					
	1	Kunjungan Kerja Bersama Bupati /Wakil Bupati /DPRD/Muspida /Pejabat Pmerintah Tingkat atas/Unit kerja terkait	Jumlah Aparat yang mengikuti Kunjungan Kerja Bersama Bupati /Wakil Bupati /DPRD/Muspida /Pejabat Pmerintah Tingkat atas/Unit kerja terkait dan pihak lainnya	50	orang	0	5	5	100,00	4	9	18,00		1	1				



	4	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	Jumlah evaluasi pengembangan nilai budaya	4	Kegiatan	0	-	-	-	1	1	25,00			1				1
	5	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Jumlah penghargaan dan kerjasama yang dilakukan	4	Kegiatan	0	-	-	-	1	1	25,00			1				1
8	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>		<b>Persentase Kekayaan Budaya yang dikelola</b>	85	%				-			33,40			1				13
	1	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah pagelaran seni dan budaya yang diikuti	25	Kegiatan	0	-	-	-	2	2	8,00			1	1			
	2	Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno	Jumlah bahan pustaka dan naskah kuno yang dilestarikan	5	Jenis	0	-	-	-	-	-	-			1				1
	3	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Kekayaan budaya lokal daerah	Jumlah kebijakan lokal daerah yang disusun	5	Perda	0	-	-	-	2	2	40,00			1				1

4	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Terselenggaranya Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	5	Kegiatan	0	-	-	-	1	1	20,00		1				1
5	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Jumlah Situs Budaya yang dilestarikan	100	Situs	0	-	-	-	29	29	29,00		1		1		
6	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Terbangunnya sarana kebudayaan dan pariwisata	1	Paket	0	-	-	-	4	4	400,00		1			1	
7	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	Jumlah Buku Sejarah/ Kamus Limola	500	Eksamplar	0	-	-	-	20	20	4,00		1				1
		Jumlah buku Cagar Budaya Situs Makam Datok Pattimang	500	Eksamplar	0	-	-	-	-	-	-		1				1
		Jumlah buku tentang Cagar Budaya Struktur Kemakolean Baebunta	1	Dokumen	0	-	-	-	-	-	-		1				1

8	Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka	Terlaksananya perekaman dan digitalisasi pembuatan video klip	1	Kegiatan	0	-	-	-	-	-	-	1		1		
9	Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala	Terselenggaranya perumusan kebijakan sejarah dan purbakala	1	Kegiatan	0	-	-	-	-	-	-	1				1
10	Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah pelaporan yang dihasilkan	10	Kegiatan	0	-	-	-	-	-	-	1				1
11	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Jumlah museum dan taman budaya yang dikelola	1	Kegiatan	0	-	-	-	-	-	-	1				1
12	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	Jumlah karya cetak dan karya rekam yang dikelola	1	Kegiatan	0	-	-	-	-	-	-	1				1
13	Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala	Jumlah data base informasi sejarah purbakala	2	Kegiatan	0	-	-	-	-	-	-	1				1



	5	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi	24	Laporan	0	-	-	-	4	4	16,67		1	1			
	6	Pengembangan daerah tujuan wisata	Terwujudnya pengembangan objek pariwisata	4	dok	0	-	-	-	1	1	25,00		1				1
	7	Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standardisasi	Terlaksananya pengembangan, sosialisasi dan penerapan pengawasan standardisasi	3	Keg.	0	-	-	-	-	-	-		1				1
<b>10</b>	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>		<b>Persentase Keragaman Budaya yang dikelola</b>	<b>85</b>	<b>%</b>				<b>0</b>			<b>27,41</b>		<b>1</b>				
	1	Pengembangan kesenian & kebudayaan daerah	Pengadaan alat kesenian	5	Paket	0	-	-	-	2	2	40,00		1		1		
Pembangunan Gedung kesenian			2	unit	0	-	-	-	-	-	-	-		1				1
Pengadaan Pakaian Kesenian			5	Paket	0	-	-	-	-	1	1	20,00		1				
	2	Penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan	Jumlah sistem data base bidang kebudayaan	5	dok	0	1	-	-	1	1	20,00		1				1

	3	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	Jumlah dialog kebudayaan yang dilaksanakan	3	Kegiatan	0	-	-	-	-	-	-	1					1
	4	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Jumlah partisipasi lomba yang mengikuti Orientasi	2	kegiatan	0	-	-	-	-	-	-	1					1
	5	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah partisipasi lomba dan pagelaran seni budaya Tingkat Kabupaten	6	Kegiatan	0	-	-	-	4	4	66,67	1				1	
	6	Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal	Terlaksananya seminar	1	Kegiatan	0	-	-	-	-	-	-	1					1
	7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya	Jumlah Laporan Monev Pelaksanaan Pengembangan Keragaman Budaya	4	Laporan	0	-	-	-	4	4	100,00	1				1	
11	<b>Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata</b>		<b>Persentase Kemitraan Pariwisata yang dikembangkan</b>	<b>85</b>	<b>%</b>							<b>16,67</b>	<b>1</b>					

1	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata	1	Kegiatan	0	-	-	-	-	-	-	-	1					1
2	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Meningkatnya paket wisata unggulan	1	Kegiatan	0	-	-	-	-	-	-	-	1					1
3	pelaksanaan koordinasi pembangunan objek wisata dengan lembaga/dunia usaha	Terjadinya kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha kepariwisataan	1	Kegiatan	0	-	-	-	-	-	-	-	1					1
4	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program peningkatan kemitraan	Meningkatnya program kemitraan pariwisata	1	Kegiatan	0	-	-	-	-	-	-	-	1					1
5	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Meningkatnya SDM bidang pariwisata	1	Kegiatan	0	-	-	-	-	-	-	-	1					1

	6	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kemitraan	Tersedianya laporan dan bahan evaluasi untuk pengembangan kemitraan pariwisata	1	Kegiatan	1	-	-	-	-	1	100,00			1				1
		<b>CAPAIAN KINERJA OUT COME</b>							12,73	sangat rendah		49,07	sangat tinggi	11	61	8	5	17	46
		<b>CAPAIAN KINERJA OUT PUT</b>							97,00	sangat tinggi		70,44	sedang		124,59	13,11	8,20	27,87	75,41

**TABEL 2**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN LUWU UTARA**

NO	INDIKATOR	SATUAN	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		2AA
					TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	
<b>A.</b>	<b>Bidang Kebudayaan</b>												
1	Jumlah Lembaga Adat yang dibina	Persen		√	43	48	50	61	0	48	51	63	
2	Jumlah Grup Kesenian ( Pembinaan dan Pembentukan Sanggar Seni/Tari/Budaya)	Kelompok		√	12	14	14	16	0	8	15	20	
3	Jumlah Gedung Kesenian	Unit		√	1	1	1	2	0	0	1	2	
4	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kegiatan		√	1	1	1	1	0	1	1	1	
5	Jumlah Pengunjung Festival Seni dan Budaya	Orang		√	6000	11000	16000	17000	0	6000	16500	17500	
6	Tingkat Pembinaan Tradisi dan Kesenian Daerah (Persentase Tradisi dan Kebudayaan Daerah yang dibina)	Persen		√	65	70	80	90	0	80	82	93	
7	Jumlah Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Kegiatan		√	1	1	1	1	0	1	1	1	
8	Jumlah Benda/Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit		√	26	26	26	26	0	29	27	27	
<b>B.</b>	<b>Bidang Pariwisata</b>												
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Lokal	Orang		√	25000	27.000	30.000	40.000	26000	35.000	40.000	41.000	



**Tabel 3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018**  
**Kabupaten Luwu Utara**

**Nama SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
<b>WAJIB KEPEGAWAIAN</b>					<b>WAJIB KEPEGAWAIAN</b>					
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>					<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disbudpar	Jumlah Surat yang terkirim/masuk	1500 surat	1.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disbudpar	Jumlah Surat yang terkirim/masuk	1500 surat	1.500.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disbudpar	Jumlah pemakaian listrik dan internet	2 jenis(Listrik + wifi)	4.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disbudpar	Jumlah pemakaian listrik dan internet	2 jenis(Listrik + wifi)	4.000.000	
Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	Disbudpar	Jumlah kendaraan dinas dan kendaraan operasional yang terpelihara	1 mobil, 3 unit motor	5.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	Disbudpar	Jumlah kendaraan dinas dan kendaraan operasional yang terpelihara	1 mobil, 3 unit motor	5.000.000	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Disbudpar	Jumlah cleaning servise & bahan pembersih	2 orang, 25 bahan pembersih	8.400.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Disbudpar	Jumlah cleaning servise & bahan pembersih	2 orang, 25 bahan pembersih	8.400.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disbudpar	Jumlah Komponen Alat - alat Listrik	20 jenis	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disbudpar	Jumlah Komponen Alat - alat Listrik	2 orang, 25 bahan pembersih	10.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Disbudpar	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundanga - Undangan	7 jenis	11.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Disbudpar	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundanga - Undangan	7 jenis	11.500.000	
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Disbudpar	Jumlah aparat yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	25 orang PNS	250.000.000	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Disbudpar	Jumlah aparat yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	25 orang PNS	250.000.000	
Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketata Ushaan dan Asset	Disbudpar	Jumlah Dok. Adm. Keu., Kepegawaian, Ketatausahaan dan Asset	4 jenis dok	521.980.000	Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketata Ushaan dan Asset	Disbudpar	Jumlah Dok. Adm. Keu., Kepegawaian, Ketatausahaan dan Asset	4 jenis dok	550.000.000	
<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>					<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>					
Pengadaan kendaraan roda dua	Disbudpar	Jumlah kendaraan dinas roda dua yang diadakan	2 unit motor	36.000.000	Pengadaan kendaraan roda dua	Disbudpar	Jumlah kendaraan dinas roda dua yang diadakan	2 unit motor	36.000.000	
Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Disbudpar	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1 paket	72.800.000	Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Disbudpar	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1 paket	72.800.000	
pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Disbudpar	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	15.000.000	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Disbudpar	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	15.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Disbudpar	Jumlah kendaraan dinas & operasional yang dipelihara	1 unit mobil, 1 unit motor	10.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Disbudpar	Jumlah kendaraan dinas & operasional yang dipelihara	1 unit mobil, 1 unit motor	10.000.000	
Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Disbudpar	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	10 jenis	5.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Disbudpar	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	10 jenis	5.000.000	
pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Disbudpar	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 paket	10.000.000	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Disbudpar	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 paket	10.000.000	
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>					<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>					
Bimbingan Teknis Inplementasi Peraturan Perundang - undangan	Disbudpar	Jumlah aparat yang Mengikuti Bimtek & Latpim	10 orang	35.000.000	Bimbingan Teknis Inplementasi Peraturan Perundang - undangan	Disbudpar	Jumlah aparat yang Mengikuti Bimtek & Latpim	10 orang	35.000.000	
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>					<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>					
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Disbudpar	Jumlah dokumen Lakip, Renstra, Renja & LPPD yang dilaporkan	4 dok	21.500.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Disbudpar	Jumlah dokumen Lakip, Renstra, Renja & LPPD yang dilaporkan	4 dok	21.500.000	
<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN</b>					<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN</b>					
Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah Atas/Unit Kerja terkait	Disbudpar	Jumlah Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah Atas/Unit Kerja terkait	20 Kegiatan	35.000.000	Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah Atas/Unit Kerja terkait	Disbudpar	Jumlah Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah Atas/Unit Kerja terkait	20 Kegiatan	35.000.000	
<b>KEBUDAYAAN</b>					<b>KEBUDAYAAN</b>					
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA</b>					<b>PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA</b>					
Pelestarian & Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Disbudpar	Jumlah Kegiatan Adat budaya daerah yang dilaksanagn	1 Kegiatan	150.000.000	Pelestarian & Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Disbudpar	Jumlah Kegiatan Adat budaya daerah yang dilaksanagn	1 Kegiatan	150.000.000	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA</b>					<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA</b>					
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Kab. Luwu Utara	Jumlah partisipasi pagelaran Seni dan Budaya yang diikuti	7 kegiatan	100.000.000	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Kab. Luwu Utara	Jumlah partisipasi pagelaran Seni dan Budaya yang diikuti	7 kegiatan	100.000.000	
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Kab. Luwu Utara	Jumlah kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah yang disusun	2 Aturan	105.000.000	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Kab. Luwu Utara	Jumlah kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah yang disusun	2 Aturan	105.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pengelolaan dan Pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Kab. Luwu Utara	Jumlah Situs Budaya yang Dilestarikan	7 situs	250.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Kab. Luwu Utara	Jumlah Situs Budaya yang Dilestarikan	7 situs	250.000.000	
Pengembangan Nilai & Geografi Sejarah	Kab. Luwu Utara	Jumlah Buku & Kamus Sejarah yang disusun	3 Buku/Kamus	150.000.000	Pengembangan Nilai & Geografi Sejarah	Kab. Luwu Utara	Jumlah Buku & Kamus Sejarah yang disusun	3 Buku/Kamus	150.000.000	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA</b>					<b>PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA</b>					
Pengembangan kesenian & kebudayaan daerah	Kab. Luwu Utara	Jumlah baju adat, alat kesenian & gedung kesenian yang diadakan	5 baju adat, 1 paket alat kesenian, 1 buah gedung	100.000.000	Pengembangan kesenian & kebudayaan daerah	Kab. Luwu Utara	Jumlah baju adat, alat kesenian & gedung kesenian yang diadakan	5 baju adat, 1 paket alat kesenian, 1 buah gedung	100.000.000	
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Kab. Luwu Utara & Makassar	Jumlah pagelaran/pentas seni dan budaya yang diselenggarakan	11 kegiatan	50.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Kab. Luwu Utara & Makassar	Jumlah pagelaran/pentas seni dan budaya yang diselenggarakan	11 kegiatan	50.000.000	
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Keanekaragaman Budaya	Kab. Luwu Utara	Jumlah Laporan money pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya	4 laporan	50.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Keanekaragaman Budaya	Kab. Luwu Utara	Jumlah Laporan money pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya	4 laporan	50.000.000	
<b>PARIWISATA</b>					<b>PARIWISATA</b>					
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA</b>					<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA</b>					
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Kab. Luwu Utara	Jumlah promosi pariwisata yang dilaksanakan	1 Kegiatan	100.000.000	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Kab. Luwu Utara	Jumlah promosi pariwisata yang dilaksanakan	1 Kegiatan	100.000.000	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA</b>					<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA</b>					
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	Kab. Luwu Utara	Jumlah objek wisata yang dikembangkan	6 ODTW	310.975.000	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	Kab. Luwu Utara	Jumlah objek wisata yang dikembangkan	6 ODTW	320.000.000	
Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Kab. Luwu Utara	Jumlah sarana ODTW yang dibangun	18 Sarana	473.100.000	Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Kab. Luwu Utara	Jumlah sarana ODTW yang dibangun	18 Sarana	480.000.000	
Pemantauan & Evaluasi Pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata	Kab. Luwu Utara	Jumlah laporan hasil pemantauan & evaluasi	4 Laporan	50.000.000	Pemantauan & Evaluasi Pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata	Kab. Luwu Utara	Jumlah laporan hasil pemantauan & evaluasi	4 Laporan	50.000.000	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN</b>					<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN</b>					

Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pengembangan dan Penguatan, Informasi data Base	Kab. Luwu Utara	Jumlah Data Informasi yang dikembangkan	1 dokumen	100.000.000	Pengembangan dan Penguatan, Informasi data Base	Kab. Luwu Utara	Jumlah Data dan Informasi yang dikembangkan	1 dokumen	100.000.000	
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Kab. Luwu Utara	Meningkatnya pengetahuan ODTW bagi petugas retribusi	40 Orang	25.000.000	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Kab. Luwu Utara	Meningkatnya pengetahuan ODTW bagi petugas retribusi	40 Orang	25.000.000	

**Tabel 4**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2019**  
**KABUPATEN LUWU UTARA**

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan alat musik	Desa Sumberdadi Kec. Tanalili	Jumlah alat musik yang diadakan	1 unit	Prioritas
2	Bantuan peralatan sanggar seni	Desa Rampoang Kec. Tanalili	Jumlah peralatan sanggar seni yang diadakan		
3	Pangadaan alat musik	Desa Munte Kec. Tanalili	Jumlah alat musik yang diadakan	1 unit	Prioritas
4	Pengadaan alat kasida modern	Desa Karondong Tanalili	Jumlah alat kasida modern yang diadakan		
5	Pembangunan sanggar seni budaya	Desa Tulungsari Kec. Sukamjau	Jumlah bangunan sanggar seni budaya yang dilaksanakan	1 Paket	Prioritas
6	Pembinaan dan Pengembangan Adat Rampi / Salulemo	Desa Salulemo Kec. Baebunta	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan adat Rampi / Salulemo		
7	Pengadaan baju seragam pemangku adat	Desa Sassa Kec. Baebunta	Jumlah baju seragam pemangku adat yang diadakan	10 pasang	Prioritas
8	Perbaikan sarana wisata permandian air panas kanan	Desa Parara Kec. Sabbang	Terlaksananya sarana wisata permandian air panas kanan		Prioritas
9	Pembukaan akses jalan roda dua air terjun Salubunto	Desa Tandung Kec. Sabbang	Persentase akses jalan roda dua air terjun salubunto		
10	Pelestarian budaya pesta panen	Desa Bone Subur Kec. Sabbang	Terlaksananya budaya pesta panen yang dilestarikan		

11	Pengadaan alat rebana untuk majelis taklim	Desa Malimbu Kec. Kec. Sabbang	Jumlah alat rebana untuk majelis taklim yang diadakan		Prioritas
12	Bantuan sapras pelestarian budaya daerah	Desa Parara Kec. Sabbang	Jumlah sapras pelestarian budaya daerah yang dilaksanakan		
13	Pembentukan sanggar budaya	Desa Parara Kec. Sabbang	Jumlah sanggar budaya yang dibentuk		
14	Pengadaan alat kasida untuk majelis taklim	Desa Batu Alang Kec. Sabbang	Jumlah alat kasida untuk majelis taklim yang diadakan		
15	Pembangunan rumah adat dusun Tapping	Desa Tokke Kec. Malangke	Jumlah rumah adat yang bangun	1 unit	
16	Pembangunan rumah adat desa Pao	Desa Pao Kec. Malangke Barat	Jumlah rumah adat yang bangun	1 unit	Prioritas
17	Pengembangan objek wisata	Kec. Rongkong	Persentase objek wisata yang dilaksanakan		Prioritas
18	Pembangunan sanggar budaya adat Ambalong dan Pohoneang	Kec. Seko	Jumlah bangunan sanggar budaya yang diadakan		

**TABEL 5**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2019**  
**Kabupaten Luwu Utara**

**SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 16 2 16 1 01	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan								
2 16 01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata								
2 16 2 16 01 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran</b>							
2 16 2 16 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim/masuk	Disbudpar	1500 Surat	1.500.000	APBD	1500 Surat	1.600.000	
2 16 2 16 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Pemakaian Listrik dan Internet	Disbudpar	2 Jenis	4.000.000	APBD	2 Jenis	4.500.000	
2 16 2 16 01 01 06	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara dan diterbitkan perizinannya	Disbudpar	1 Mobil 3 Motor	5.000.000	APBD	1 Mobil 3 Motor	5.000.000	
2 16 2 16 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan	Jumlah Alat/Bahan Kebersihan Kantor yang disediakan	Disbudpar	2 orang	8.400.000	APBD	2 orang	8.400.000	
2 16 2 16 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Alat-alat Listrik	Disbudpar	20 jenis	10.000.000	APBD	20 jenis	10.500.000	
2 16 2 16 01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bacaan dan Peraturan Parundang-Undangan	Disbudpar	7 Jenis	11.500.000	APBD	7 Jenis	11.500.000	
2 16 2 16 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	Jumlah Aparat yang mengikuti rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Disbudpar	25 PNS	250.000.000	APBD	25 PNS	300.000.000	
2 16 2 16 01 01 19	Penatausahaan keuangan, Administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan asset	Jumlah dokumen administrasi keuangan dan Kepegawaian	Disbudpar	4 Jenis Dokumen	521.980.000	APBD	4 Jenis Dokumen	550.000.000	
2 16 2 16 01 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>							
2 16 2 16 01 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas roda dua yang diadakan	Disbudpar	2 Unit Motor	36.000.000	APBD	2 Unit Motor	38.000.000	
2 16 2 16 01 02 09	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Disbudpar	1 Paket	72.800.000	APBD	1 Paket	75.000.000	
2 16 2 16 01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Disbudpar	1 Gedung	15.000.000	APBD	1 Gedung	15.000.000	
2 16 2 16 01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	Disbudpar	1 Mobil & 1 Motor	10.000.000	APBD	1 Mobil & 1 Motor	12.000.000	
2 16 2 16 01 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara	Disbudpar	10 Jenis	5.000.000	APBD	10 Jenis	7.000.000	
2 16 2 16 01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	Disbudpar	1 Paket	10.000.000	APBD	1 Paket	12.000.000	
2 16 2 16 01 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Efisiensi dan efektifitas, kapasitas sumber daya aparatur</b>							
2 16 2 16 01 05 03	Bimbingan teknis implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimtek yang diikuti	Disbudpar	10 Orang	35.000.000	APBD	10 Orang	50.000.000	
2 16 2 16 01 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase tertibnya administrasi dan laporan tepat waktu sesuai SAP</b>							
2 16 2 16 01 06 01	Penyusunan laporan Capaian dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah Dokumen Lakib, Renstra, Renja, LPPD yang dilaporkan	Disbudpar	4 Dokumen	21.500.000	APBD	4 Dokumen	21.500.000	
2 16 2 16 01 09	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan</b>	<b>Persentase Pelayanan Kedinasan</b>	Disbudpar	90%		APBD	90%		
2 16 2 16 01 09 01	Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati, DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah Tingkat Atas/ Unit Kerja Terkait	Jumlah Kunjungan kerja bersama/Bupati/wakil Bupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah tingkat Atas yang telah diikuti	Disbudpar	20 Kunjungan	35.000.000	APBD	20 Kunjungan	35.000.000	
2 16 2 16 01 15	<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>	<b>Persentase Pemasaran pariwisata yang dikembangkan</b>		100%		APBD	100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 16 2 16 01 15 05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam negeri dan di luar negeri	Jumlah Kegiatan Audisi, Pameran Pariwisata yang diikuti dalam rangka menarik investor	Kabupaten Luwu Utara	1 Kegiatan	100.000.000	APBD		1 Kegiatan	100.000.000
2 16 2 16 01 15	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	<b>Persentase Kekayaan Budaya yang dikelola</b>							
2 16 2 16 01 15 1	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah aktualisasi adat budaya daerah yang dilaksanakan	Kabupaten Luwu Utara	1 Kegiatan	150.000.000			1 Kegiatan	150.000.000
2 16 2 16 01 16	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>								
2 16 2 16 01 16 01	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah Partisipasi Pageran Seni dan Budaya yang Diikuti	Dalam dan Luar Provinsi Sulawesi Selatan	7 Kegiatan	100.000.000	APBD		7 Kegiatan	100.000.000
2 16 2 16 01 16 3	Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal yang disusun	Kabupaten Luwu Utara	2 Aturan	105.000.000	APBD		2 Aturan	105.000.000
2 16 2 16 01 16 05	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peningkatan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Jumlah Situs Budaya yang dilestarikan	Kabupaten Luwu Utara	7 Situs	250.000.000	APBD		7 Situs	250.000.000
2 16 2 16 01 16 07	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	Jumlah Buku & kamus yang disusun	Kabupaten Luwu Utara	3 Buku/Kamus	150.000.000	APBD		3 Buku/Kamus	150.000.000
2 16 2 16 01 16	<b>Program Pengembangan destinasi Pariwisata</b>								
2 16 2 16 01 16 01	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Jumlah Objek wisata yang dikembangkan	Kabupaten Luwu Utara	6 ODTW	310.975.000	APBD		6 ODTW	320.000.000
2 16 2 16 01 16 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah sarana ODTW yang dibangun	Kabupaten Luwu Utara	18 Sarana	473.100.000	APBD		18 Sarana	480.000.000
2 16 2 16 01 01 05	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi	Kabupaten Luwu Utara	4 Laporan	50.000.000	APBD		4 Laporan	60.000.000
2 16 2 16 01 17	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>								
2 16 2 16 01 17 1	Pengembangan kesenian & kebudayaan daerah	Jumlah baju adat, alat kesenian & gedung kesenian yang diadakan	Kabupaten Luwu Utara	5 baju adat, 1 paket alat kesenian, 1 bh gedung	100.000.000	APBD		5 baju adat, 1 paket alat kesenian, 1 bh gedung	150.000.000
2 16 2 16 01 17 05	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya	Jumlah pagelaran/pentas seni dan budaya yang diselenggarakan	Luwu Utara dan Masamba	11 Kegiatan	50.000.000	APBD		11 Kegiatan	60.000.000
2 16 2 16 01 17 07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya	Jumlah Laporan Monev Pelaksanaan Pengembangan Keraagaman Budaya	Kabupaten Luwu Utara	4 Laporan	50.000.000	APBD		4 Laporan	60.000.000
	<b>Program Pengembangan Kemitraan</b>								
3 02 2 16 1 17 1	Pengembangan dan Penguatan, Informasi Data Base	Jumlah Data Informasi yang dikembangkan	Kabupaten Luwu Utara	1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	60.000.000
					<b>Jumlah</b>	<b>3.041.755.000</b>			<b>3.202.000.000</b>

Masamba, Juni 2017

**Kepala Dinas**

**Drs. F.P. Patuang, MM**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip . 19610929 198303 1 008